



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2023**

BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Kami menyadari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Bekasi,

2024

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

KARTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19670415 198603 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi	5
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	7
1.5. Sistematika Penyajian	21
BAB II Perencanaan Kinerja	24
2.1. Rencana Strategis	24
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	26
2.2. Perjanjian Kinerja	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	38
3.3. Realisasi Anggaran	76
BAB IV Penutup	82
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 1.4.2	Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	14
Tabel 1.4.3	Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
Tabel 1.4.4	Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	15
Tabel 1.4.5	Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	16
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	25
Tabel 2.1.2	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	27
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja	30
Tabel 2.2.2	Alokasi Anggaran	31
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023..	37
Tabel 3.2.1	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	39
Tabel 3.2.2	Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	39
Tabel 3.2.3	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	41
Tabel 3.2.4	Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya.....	42
Tabel 3.2.5	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	43
Tabel 3.2.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	44
Tabel 3.2.7	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	49
Tabel 3.2.8	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2023.....	50
Tabel 3.2.9	Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023.....	51
Tabel 3.2.10	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022.....	52
Tabel 3.2.11	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP.....	53
Tabel 3.2.12	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP Dengan Tahun Sebelumnya	53

Tabel 3.2.13	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	54
Tabel 3.2.14	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP..	55
Tabel 3.2.15	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP	59
Tabel 3.2.16	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2023	61
Tabel 3.2.17	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	62
Tabel 3.2.18	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	63
Tabel 3.2.19	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	63
Tabel 3.2.20	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	64
Tabel 3.2.21	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	65
Tabel 3.2.22	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	65
Tabel 3.2.23	Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	66
Tabel 3.2.24	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023	68
Tabel 3.2.25	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM.....	69
Tabel 3.2.26	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM Dengan Tahun Sebelumnya.....	70
Tabel 3.2.27	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target	71
Tabel 3.2.28	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	72
Tabel 3.2.29	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	76
Tabel 3.3.1	Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat di seluruh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi;

2. Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .
Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di Perubahan RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penetapan sasaran

strategis ini untuk menunjang pencapaian misi V yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran. Sasaran 1 : terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

2. Indikator kinerja utama satuan polisi pamong praja yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipergunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada Renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi V yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran. Jika melihat capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 diperoleh capaian kinerja dengan nilai sebesar 88,58.

Sejalan dengan hal tersebut diharapkan pada Tahun 2023 Satpol PP dapat lebih meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Ada pun kinerja yang di tingkatkan pada tahun ini sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja yang harus di capai tahun 2022 telah berubah menjadi Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada adalah dengan target capaian sebesar 8%, maka tantangan yang harus di hadapi oleh satuan polisi pamong praja adalah bisa mencapai target tersebut atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat di satuan polisi pamong praja memperoleh pencapaian kinerja 2023 dengan predikat B, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 88,58

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 ini.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2013. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum memenuhi harapan masyarakat. Terlebih dalam situasi global-internasional yang semakin menantang dengan segala tuntutan dan diskursus yang secara jelas menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dan fakta yang terjadi.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dan mitra ibukota yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kondusifitas wilayah sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tipikal penduduk yang berasal dari kalangan masyarakat heterogen baik suku, bangsa di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya harmonisasi yang mampu meredam maupun meminimalisir berbagai konflik dan kerawanan sosial dari mulai vertikal maupun horizontal dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

	Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam

		Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	<p>Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini</p> <p>Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka</p>

			ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sumber : Renja 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu dalam pelaksanaannya Satpol PP Kota Bekasi dituntut menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis perubahan 2018-2023 dan juga capaian kinerjanya. Adapun **Standar Pelayanan Minimal yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah **Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan target sebesar 100 persen.**

Dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut, dibutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satpol Polisi

Pamong Praja Kota Bekasi. Dimana pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan penegakkan PERDA, menjaga dan memelihara Keamanan, Ketentraman dan ketertiban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas komposisi jumlah 694 orang yang terdiri dari 204 orang ASN dan 490 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota	1
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
4	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan	1
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan	1
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peratuan Lainnya	1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat	1
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	1
10	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	1
11	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	1
12	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan	1
13	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	1
14	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	1
15	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	1
16	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	1
17	Kepala Seksi Data dan Informasi	1

NO	JABATAN	JUMLAH
18	Pejabat Fungsional	53
19	PNS (Pelaksana staff perbagian)	151
20	Non PNS	490
	Jumlah	694

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menurut jenjang pendidikan dapat disajikan kedalam Tabel berikut:

Tabel 1.4.2
Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	PNS	TKK
1.	S3	-	-
2.	S2	11	2
3.	S1	68	182
4.	D3	1	28
	D2	-	-
	D1	-	-
5.	SLTA	115	272
6.	SLTP	6	1
7.	SD	-	-
Jumlah Keseluruhan		204	490

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2023.

Tentunya kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut:

Tabel 1.4.3
Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	Struktural	17
2	Fungsional	53
3	Pemerintahan	1
4	Teknis	45
5	Diklat Dasar Satpol PP	480
Jumlah		596

Sumber: Satpol PP, 2023.

Tabel 1.4.4
Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS	TKK
1.	S3	-	-
2.	S2	11	2
3.	S1	68	182
4.	D3	1	28
	D2	-	-
	D1	-	-
5.	SLTA	115	272
6.	SLTP	6	1
7.	SD	-	-
Jumlah Keseluruhan		204	490

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2022.

Dengan jumlah personil 694 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis yang baru mencapai 85,9%

maka kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus segera menyelesaikan 14,1% lagi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pencapaian kinerja pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memetakan kebutuhan personil teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 1.4.5
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik	4
2.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	7
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	4
4.	Pengelola Barang Persediaan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	3
5.	Pranata Kearsipan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
8.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik	2
9.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	2
10.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen	2
11.	Pengelola Bahan Perencanaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Akuntansi/ Manajemen	2
12.	Verifikator Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran	2
13.	Bendahara	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
14.	Pengadministrasi Keuangan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	2
15.	Penata Laporan Keuangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi	1
16.	Pengolah Data Laporan Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
17.	Pengelola Gaji	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
18.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Ilmu pemerintahan/ Ilmu administrasi/ kebijakan publik/ Ilmu Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2
19.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Minimal Diploma III di bidang Teknik Infomatika/ teknik komputer/ Administrasi Pekantoran	15
20.	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	24
21.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	326
22.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	SLTA/ DI/ DII/ DIII semua bidang dan telah mengikuti pelatihan gada pratama/ madya/ utama (bersertifikat)	140
23.	Analisis Polisi Pamong Praja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Hukum/ Administrasi Negara/ Sosial politik	1
24.	Analisis Keamanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Pemerintahan/Sosial Politik	2
25.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	102
26.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1
27.	Analisis Pengaduan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
28.	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
29.	Analisis Produk Hukum	S-1 (Strata-Satu) Hukum	1
30.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
31.	Petugas Penindakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma Empat) bidang hukum/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
32.	Pengelola Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatik	1
33.	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi	2
34.	Pengelola Bimbingan Masyarakat	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kesejahteraan Sosial/Sosiologi/Sosial dan Politik	2
35.	Analisis Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana(S 1)/Diploma IV bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	1
36.	Penyusun Bahan Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana (S 1)/ Diploma IV bidang Agama/ Sosiologi/Filsafat Islam	1
37.	Analisis Pengaduan masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
38.	Pengelola Pengaduan Publik	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Komunikasi/ Teknik Infomatika/Teknik Komputer	2
39.	Analisis Pelanggaran Disiplin	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	2
40.	Analisis Perlindungan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistik/Penelitian/Hukum/Kebijakan Publik	1
41.	Pranata Perlindungan Masyarakat	SLTA/D1/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
42.	Pengadministrasi Umum	SLTA/D1/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
43.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan/ Teknik Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota/ Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi Studi Pembangunan	1
44.	Pengolah Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika	1
45.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	1

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
46.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	1
47.	Pengadministrasi Pelatihan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	1
48.	Pol PP Pemula	SLTP/SLTA	9
49.	Pol PP Terampil	SLTA	44
50.	Pol PP Mahir	SLTA/D3/S1	36
51.	Pol PP Penyelia	SLTA/D3/S1	0
52.	Pol PP Ahli pertama	S1/D-4	31
53.	Pol PP Ahli Muda	S1/D-4/S2/S3	8
54.	Pol PP Ahli Madya	S1/D-4/S2/S3	0

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2023.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi;

kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.
- C. Akuntabilitas Anggaran
- Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.
- D. Prestasi Organisasi
- Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2023.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 2 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan “Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Berdasarkan RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018- 2023.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	01.31	01.31	01.31	01.31	01.31
			Jumlah personil yang mengikuti diklat	30	30	30	30	30
			Prosentase penegakan perda	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
			Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023 (perubahan)

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TARGET TAHUN 2023	PROSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
101	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0				SATPOL PP
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	0,06	1;31	1;31	TERDIRI DARI 31 ORANG SATLINMAS SETIAP KELURAHAN YANG ADA	SATPOL PP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100,00	100,00	100,00	JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK DAN DAPAT DITANGANI	SATPOL PP
		Persentase penegakan pelanggaran perda	%	100,00	100,00	100,00	TERLAKSANANNYA OPTIMALISASI PERDA DAN PERKADA	SATPOL PP

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (perubahan)

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.2.2) :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	BB	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	A
		IKM	Nilai	A	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	B

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

Tabel. 2.2.2
Alokasi Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.004.130.920,00	68.177.373.904,00	99,87	92,13
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.989.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,73</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.992.500,00	100,00	99,63
	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.996.500,00	100,00	99,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37.274.314.000,00	33.724.556.742,00	100,00	90,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00	100,00	90,48
	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2.000.000,00	1.997.000,00	100,00	99,85

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

	Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.917.400,00	601.004.563,00	100,00	88,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000,00	70.056.000,00	100,00	93,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400,00	296.852.663,00	100,00	93,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000,00	66.777.900,00	100,00	79,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	30.825.000,00	100,00	61,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	106.493.000,00	100,00	85,19
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.562.609.120,00	31.546.717.617,00	98,91	93,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	850.000.000,00	780.781.596,00	100,00	91,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32.712.609.120,00	30.765.936.021,00	97,83	94,05
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Millik Daerah	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	100,00	92,01

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400,00	102.789.171,00	100,00	85,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	100,00	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000,00	162.999.570,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	198.383.220,00	100,00	99,19
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	18.100.856.450,00	16.730.483.530,00	180,00	92,43
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	17.495.891.450,00	16.161.856.980,00	220,00	92,38
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	507.146.000,00	818.042.000,00	100,00	161,30
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400,00	398.758.000,00	100,00	73,46
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000,00	144.198.000,00	100,00	98,48
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00	100,00	89,07

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000,00	464.710.000,00	100,00	97,82
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	76.775.000,00	532.329.080,00	1.060,00	693,36
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000,00	256.922.000,00	100,00	59,33
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	430.785.000,00	414.606.550,00	100,00	96,24
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	147.350.000,00	145.740.000,00	100,00	98,91
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.985.000,00	119.884.050,00	100,00	99,09
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	162.450.000,00	148.982.500,00	100,00	91,71
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43

Sumber : Data Realisasi Anggaran tahun 2023, diolah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dilaksanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Dengan melihat 3 indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana rata rata capaian indikator tercapai/terlampai maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi capaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan mendukung capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman serta Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	%	100%	100%	100%
			Jumlah personil yang mengikuti diklat	%	100%	100%	100%
			Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
			Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	A	A	Tercapai
			Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	Terlampau

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2023

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelenggaraa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

1. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman adalah dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023.

Untuk mengukur Persentase indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Keamanan dan ketertiban penting untuk mewujudkan kota yang kondusif sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat beraktivitas.

Capaian Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2023 diperoleh realisasi 100 persen dari target sebesar 100 persen.

Capaian target indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 melampaui target yang diharapkan. Sejalan dengan perubahan indikator Kinerja Utama maka terdapat pula perubahan penggunaan data sumber untuk variabel penghitungan sehingga secara pelaporan LKIP Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan laporan LKIP Tahun sebelumnya yaitu 2023.

Adapun rincian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

No	Kejadian	Tahun	
		2022	2023
1.	Pembunuhan	4	3
2.	Penganiayaan Berat	56	83
3.	Pencurian Berat	182	216

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023

No	Kejadian	Tahun	
		2022	2023
4.	Pencurian dengan Kekerasan	13	13
5.	Pencurian Roda 2	180	287
6.	Pencurian Roda 4	2	6
7.	Pemerasan dan Ancaman	40	43
8.	Kebakaran	1	2
9.	Perjudian	16	6
10.	Perkosaan	0	4
11.	Narkoba	252	
12.	Penggelapan	118	75
13.	Penipuan	747	400
14.	Pengrusakan	6	4
15.	Pembakaran	5	
16.	Pengeroyokan	51	45
17.	Penadahan	17	9
18.	Pencurian Biasa	130	75
19.	Pencabulan/Perzinahan/Asusila	95	20
20.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	16	
21.	Penyerobotan Tanah	24	17
22.	Pemalsuan Surat/Keterangan Palsu	23	7
23.	Fitnah	4	
24.	Penghinaan	6	
25.	Pencemaran Nama Baik	22	
26.	Penganiayaan Ringan	45	29
27.	Senjata Tajam	61	
28.	Kejahatan Dalam Rumah Tangga	54	32
30.	Pelanggaran Hak Cipta	1	1
31.	Penculikan	1	
32.	Kejadian lain-lain	117	244
Jumlah		2.290	1.621

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2023

Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Komitmen Pimpinan untuk dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
4. Terobosan dan Inovasi dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum.

Pencapaian Indikator Prosentas Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh Indikator Program pada beberapa perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	Rasio	1:31	1:31
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100
2	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2023

Dengan melihat capaian indikator program yang mendukung Pencapaian Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi

Pamong Praja, dimana ketiga indikator tercapai.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dilakukan mengingat terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yang berpengaruh terhadap perbedaan sumber data variabel penghitungan yang digunakan.

Adapun capaian kinerja tahun 2023 dengan menggunakan indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran perda dan perkara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan
Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	100	100	100			
Setelah Penyesuaian Tupoksi								
1.	Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada					100	100	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja
Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran
Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	
		2022	2023
Target	%	100	100
Realisasi	%	100	100

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra, dimana pada tahun 2023 baru mencapai 100 persen, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target sebesar poin.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodifikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran.
2. Optimalisasi anggaran.
3. Peningkatan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan kualitas pendataan dan evaluasi.
5. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan

Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.004.130.920,00	68.177.373.904,00	99,87	92,13
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.989.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,73</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.992.500,00	100,00	99,63
	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.996.500,00	100,00	99,83
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>37.274.314.000,00</i>	<i>33.724.556.742,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90,48</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00	100,00	90,48

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	100,00	99,85
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.917.400,00	601.004.563,00	100,00	88,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000,00	70.056.000,00	100,00	93,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400,00	296.852.663,00	100,00	93,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000,00	66.777.900,00	100,00	79,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	30.825.000,00	100,00	61,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	106.493.000,00	100,00	85,19
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.562.609.120,00	31.546.717.617,00	98,91	93,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	850.000.000,00	780.781.596,00	100,00	91,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32.712.609.120,00	30.765.936.021,00	97,83	94,05
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	100,00	92,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400,00	102.789.171,00	100,00	85,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	100,00	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000,00	162.999.570,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	198.383.220,00	100,00	99,19
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	18.100.856.450,00	16.730.483.530,00	180,00	92,43
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	17.495.891.450,00	16.161.856.980,00	220,00	92,38
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	507.146.000,00	818.042.000,00	100,00	161,30
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400,00	398.758.000,00	100,00	73,46
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000,00	144.198.000,00	100,00	98,48
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00	100,00	89,07

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000,00	464.710.000,00	100,00	97,82
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	76.775.000,00	532.329.080,00	1.060,00	693,36
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000,00	256.922.000,00	100,00	59,33
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	430.785.000,00	414.606.550,00	100,00	96,24
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	147.350.000,00	145.740.000,00	100,00	98,91
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.985.000,00	119.884.050,00	100,00	99,09
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	162.450.000,00	148.982.500,00	100,00	91,71
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43

Sumber : Data Realisasi Anggaran tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dimana pagu anggaran sebesar 92.817.098.905 (*Sembilan puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh depalan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.907.857.434,-(*Delapan puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*). dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Penurunan Jumlah Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada hanya mencapai 91.5 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 yaitu :

1. Optimalisasi sumber daya manusia berupa optimaliasi kinerja petugas di lapangan;
2. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel.3.2.7
Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator
sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat
Pelanggaran Perda dan Perkada

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	173	452
2	Bidang Penegakan Perda	14	12
3	Bidang Pembinaan	9	4
4	Bidang Linmas	7	7

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

2. Nilai AKIP

Indikator pencapaian nilai AKIP ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023.

Pengukuran nilai AKIP pada Setiap Instansi Pemerintah adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun pedoman pengukuran

pencapaian nilai indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Pemerintah yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Evaluasi terhadap capaian nilai AKIP meliputi penilaian terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Hasil Kinerja.

Capaian nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2023 diperoleh nilai BB dari target nilai B. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban sebesar BB. Adapun capaian target indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.8
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai AKIP	Persen	A	BB	Belum Terlampaui

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2023 belum mampu melampaui target nilai A pada pencapaian nilai AKIP, adapun pencapaian nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai BB merupakan tingkat akuntabilitaskinerja yang menunjukkan tingkat efektivitas dan Efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dna penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Adapun Akumulasi Rincian Penilaian terhadap komponen-komponen yang dinilai sehingga dapat menghasilkan tingkat akuntabilitas kinerja BB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD nomor 700/1291/ITKO.Irban UPD Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.9
Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,29
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,48
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,61
d.	Evaluasi Kinerja	25	17,05
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,43
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD nomor 700/1291/ITKO.Irban UPD Tahun 2023

Dan bila dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2022 terdapat penurunan nilai terhadap beberapa komponen yang dinilai di Tahun 2023 . Adapun perbandingan komponen yang dinilai pada tahun 2022 dengan 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.10
Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun	
		2022	2023
1.	Perencana Kinerja	23,69	20,29
2.	Pengukuran Kinerja	24,04	20,48
3.	Pelaporan Kinerja	12,37	10,61
4.	Evaluasi Kinerja	19,97	17,05
	Nilai Hasil Evaluasi	80,07	70,43
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	A	BB

Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaa, 2023

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Monitoring atas pelaporan kinerja;
2. Perbaikan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja.

Pencapaian nilai AKIP didukung oleh Indikator Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 3.2.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2023

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai AKIP	%	A	A	A	AA	BB	Belum Terlampaui

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian

Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang menurun. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai AKIP untuk kedepannya.

Untuk Capaian Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2023 tersebut, jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.13
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
		2022	2023
Target	%	A	AA
Realisasi	%	80,07	70,43

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Pencapaian Nilai AKIP “AA”, di mana pada tahun 2023 telah mencapai hasil BB, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi belum melampaui target nilai A dengan capaian BB yang menjadi sebagai pemicu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam meningkatkan nilai tersebut di tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pencapaian Nilai AKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Monitoring atas pelaporan kinerja;
2. Perbaikan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak

terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.14
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran Rp	Realisasi		
			Rp	Fisik (%)	Keu (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.004.130.920,00	68.177.373.904,00	99,87	92,13
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.989.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,73</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.992.500,00	100,00	99,63
	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.996.500,00	100,00	99,83

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37.274.314.000,00	33.724.556.742,00	100,00	90,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00	100,00	90,48
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	100,00	99,85
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.917.400,00	601.004.563,00	100,00	88,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000,00	70.056.000,00	100,00	93,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400,00	296.852.663,00	100,00	93,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000,00	66.777.900,00	100,00	79,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	30.825.000,00	100,00	61,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	106.493.000,00	100,00	85,19
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.562.609.120,00	31.546.717.617,00	98,91	93,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	850.000.000,00	780.781.596,00	100,00	91,86

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32.712.609.120,00	30.765.936.021,00	97,83	94,05
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	100,00	92,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400,00	102.789.171,00	100,00	85,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	100,00	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000,00	162.999.570,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	198.383.220,00	100,00	99,19
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	18.100.856.450,00	16.730.483.530,00	180,00	92,43
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	17.495.891.450,00	16.161.856.980,00	220,00	92,38
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	507.146.000,00	818.042.000,00	100,00	161,30
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400,00	398.758.000,00	100,00	73,46

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000,00	144.198.000,00	100,00	98,48
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00	100,00	89,07
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000,00	464.710.000,00	100,00	97,82
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	76.775.000,00	532.329.080,00	1.060,00	693,36
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000,00	256.922.000,00	100,00	59,33
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	430.785.000,00	414.606.550,00	100,00	96,24
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	147.350.000,00	145.740.000,00	100,00	98,91
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.985.000,00	119.884.050,00	100,00	99,09
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	162.450.000,00	148.982.500,00	100,00	91,71
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43
--	---	----------------	----------------	--------	-------

sumber : Data Realisasi Anggaran tahun 2023, diolah

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.15
Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Sekretariat	16	24

3. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku

Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 7 (jenis) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh anggota Satlinmas
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Perbantuan Penanngulangan Bencana oleh

Anggota Satlinmas

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.16
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai IKM	Persen	A	A	Tercapai

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2023 telah mampu mencapai target nilai A sebesar target 88,58 poin, pada pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adapun pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan nilai B, yaitu sebesar 85,74 poin, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Tercapai.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. pada Unit pelayanan Satpol PP Kota Bekasi diperoleh dari data Survey terhadap 543 responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya Satpol PP. Survey dilakukan pada Semester 1 Tahun 2023, responden diminta memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Adapun jenis pelayanan yang disurvei adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas

2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin di atas Tanah Negara
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas

Adapun data hasil capaian penilaian IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat terlihat pada Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 543 orang responden berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner dengan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.2.17
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan
Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.76
2	PROSEDUR	3.58
3	WAKTU PELAYANAN	3.6
4	BIAYA/TARIF	3.5
5	PRODUK PELAYANAN	3.58
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.46
7	PERILAKU PELAKSANA	3.52
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.3
9	SARANA DAN PRASARANA	3.54
	IKM Jenis Layanan	88,45

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023, diolah

Tabel 3.2.18
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan
Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.63
2	PROSEDUR	3.55
3	WAKTU PELAYANAN	3.51
4	BIAYA/TARIF	3.41
5	PRODUK PELAYANAN	3.49
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.39
7	PERILAKU PELAKSANA	3.41
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.41
9	SARANA DAN PRASARANA	3.41
	IKM Jenis Pelayanan	86.7

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023, diolah

Tabel 3.2.19
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan
Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.72
2	PROSEDUR	3.83
3	WAKTU PELAYANAN	3.64
4	BIAYA/TARIF	3.54
5	PRODUK PELAYANAN	3.46

6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.53
7	PERILAKU PELAKSANA	3.46
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.45
9	SARANA DAN PRASARANA	3.57
	IKM Jenis Layanan	89.45

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023, diolah

Tabel 3.2.20
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan
Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA
1	PERSYARATAN	3.73
2	PROSEDUR	3.76
3	WAKTU PELAYANAN	3.69
4	BIAYA/TARIF	3.53
5	PRODUK PELAYANAN	3.47
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.41
7	PERILAKU PELAKSANA	3.49
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.51
9	SARANA DAN PRASARANA	3.52
	IKM Jenis Layanan	89,18

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023, diolah

Tabel 3.2.21
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan
Penanggulangan Bencana oleh anggota Satlinmas pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.70
2	PROSEDUR	3.70
3	WAKTU PELAYANAN	3.60
4	BIAYA/TARIF	3.55
5	PRODUK PELAYANAN	3.40
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.70
7	PERILAKU PELAKSANA	3.70
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.60
9	SARANA DAN PRASARANA	3.50
	IKM Jenis Layanan	90.15

Tabel 3.2.22
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan
Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.64
2	PROSEDUR	3.66
3	WAKTU PELAYANAN	3.54
4	BIAYA/TARIF	3.56
5	PRODUK PELAYANAN	3.40

6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.50
7	PERILAKU PELAKSANA	3.44
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.40
9	SARANA DAN PRASARANA	3.45
	IKM Jenis Layanan	87.75

sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023, diolah

Dari hasil analisis terhadap rekapitulasi survey kepuasan masyarakat pada 6 jenis pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, dapat terlihat pada tabel yang disajikan berikut ini :

Tabel 3.2.23
Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	KARAKTER- ISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	306	56%
		PEREMPUAN	237	44%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	4	1%
		SLTA	155	28%
		DI/DII	6	1%
		DIII	111	20%
		SI	246	45%
		S2	16	3%
	S3	4	1%	
3	PEKERJAAN	PNS	79	14%

		SWASTA	271	50%
		WIRAUUSAHA	17	3%
		LAINNYA	176	32%
4	JENIS LAYANAN	JENIS PELAYANAN PERBANTUAN TRANTIBUMLIN MAS OLEH ANGGOTA SATLINMAS	152	28%
		JENIS PELAYANAN PENANGANAN PENGUNJUK RASA	50	9%
		JENIS PELAYANAN PENERTIBAN BANGUNAN TIDAK BERIZIN DI TANAH NEGARA	51	9%
		JENIS PELAYANAN PENERTIBAN THPP, MIRAS DAN PSK	136	25%
		JENIS PELAYANAN PENERTIBAN PMKS	135	25%

	JENIS PELAYANAN PERBANTUAN PENANGGULA NGAN BENCANA OLEH ANGGOTA SATLINMAS	20	4%
--	---	----	----

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2023

Adapun rincian jenis layanan serta unsur penilaian dalam pengukuran IKM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.24
Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Tahun	
		2022	2023
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,1	-
2.	Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa	84,72	88,45
3.	Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin	88,38	86,7
4.	Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK	87,54	89,45
5.	Pelayanan Penertiban PMKS	87,42	89,18
6.	Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas	-	90,15

7.	Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas	-	87,75
8.	Pelayanan Pengawasan Kantrantibum/Patroli Rutin	81,81	81,81
	Nilai Rata Rata	85,74	88,58
	Kategori penilaian	B	A

Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2023

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Unsur Produk;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Dan unsue Perilaku.

Tabel 3.2.25
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
---	---	---	-------	-------

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2023

Dengan melihat 6 (enam) capaian indikator program yang mendukung capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja, dimana keenam indikator tercapai maka sangat wajar apabila capaian kinerja Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2023 adalah ,yaitu dengan capaian Pencapaian Nilai IKM dengan tingkat akuntabilitas “A” dari target yang direncanakan “A”. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.26
Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai IKM	%	B	B	Terpenuhi	A	A	Terpenuhi

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik yakni mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja di kategori A. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai IKM untuk kedepannya.

Untuk Capaian Pencapaian Nilai IKM Tahun 2023 tersebut, jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.27
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja
Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
		2023	2024
Target	%	A	A
Realisasi	%	A	-

Sumber: Diolah, 2023.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Pencapaian Nilai IKM “A”, di mana pada tahun 2023 telah mencapai hasil A, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target nilai A dengan capaian A yang menjadi sebagai pemicu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mempertahankan nilai tersebut di tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pencapaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas baik dalam pengambilan keputusan, dari pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.28
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan
Perkada

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.004.130.920,00	68.177.373.904,00	99,87	92,13
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.989.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,73</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.992.500,00	100,00	99,63
	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.996.500,00	100,00	99,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>37.274.314.000,00</i>	<i>33.724.556.742,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90,48</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00	100,00	90,48
	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD</i>				

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	100,00	99,85
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.917.400,00	601.004.563,00	100,00	88,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000,00	70.056.000,00	100,00	93,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400,00	296.852.663,00	100,00	93,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000,00	66.777.900,00	100,00	79,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	30.825.000,00	100,00	61,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	106.493.000,00	100,00	85,19
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.562.609.120,00	31.546.717.617,00	98,91	93,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	850.000.000,00	780.781.596,00	100,00	91,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32.712.609.120,00	30.765.936.021,00	97,83	94,05
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	100,00	92,01

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400,00	102.789.171,00	100,00	85,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	100,00	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000,00	162.999.570,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	198.383.220,00	100,00	99,19
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan)	18.100.856.450,00	16.730.483.530,00	180,00	92,43
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	17.495.891.450,00	16.161.856.980,00	220,00	92,38
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	507.146.000,00	818.042.000,00	100,00	161,30
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400,00	398.758.000,00	100,00	73,46
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000,00	144.198.000,00	100,00	98,48
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00	100,00	89,07

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000,00	464.710.000,00	100,00	97,82
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	76.775.000,00	532.329.080,00	1.060,00	693,36
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000,00	256.922.000,00	100,00	59,33
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	430.785.000,00	414.606.550,00	100,00	96,24
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	147.350.000,00	145.740.000,00	100,00	98,91
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.985.000,00	119.884.050,00	100,00	99,09
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	162.450.000,00	148.982.500,00	100,00	91,71
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis capaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel.3.2.29
Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator
sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat
Pelanggaran Perda dan Perkada

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	173	452
2	Bidang Penegakan Perda	14	12
3	Bidang Pembinaan	9	4
4	Bidang Linmas	7	7

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut, Total anggaran pelayanan dasar untuk Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 92.817.098.905 (*Sembilan puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh depalan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.907.857.434,- (*Delapan puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*). Jika dibandingkan dengan APBD Kota bekasi Tahun 2023 yaitu Rp. 5.933.765.026.438,- (*Lima Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) maka alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah 1,6%. Adapun rincian program dan kegiatan untuk pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Program, Kegiatan dan Anggaran
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		92.104.987.370,00	84.907.857.434,00	133,03	92,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.004.130.920,00	68.177.373.904,00	99,87	92,13
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.989.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,73</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.992.500,00	100,00	99,63
	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.996.500,00	100,00	99,83

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37.274.314.000,00	33.724.556.742,00	100,00	90,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00	100,00	90,48
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	100,00	99,85
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500.000.000,00	477.180.000,00	100,00	95,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.917.400,00	601.004.563,00	100,00	88,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000,00	70.056.000,00	100,00	93,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400,00	296.852.663,00	100,00	93,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000,00	66.777.900,00	100,00	79,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	30.825.000,00	100,00	61,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	106.493.000,00	100,00	85,19
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.562.609.120,00	31.546.717.617,00	98,91	93,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	850.000.000,00	780.781.596,00	100,00	91,86

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32.712.609.120,00	30.765.936.021,00	97,83	94,05
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	100,00	92,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400,00	102.789.171,00	100,00	85,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	100,00	90,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000,00	162.999.570,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	198.383.220,00	100,00	99,19
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	18.100.856.450,00	16.730.483.530,00	180,00	92,43
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	17.495.891.450,00	16.161.856.980,00	220,00	92,38
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	507.146.000,00	818.042.000,00	100,00	161,30
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400,00	398.758.000,00	100,00	73,46

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000,00	144.198.000,00	100,00	98,48
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00	100,00	89,07
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000,00	464.710.000,00	100,00	97,82
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	76.775.000,00	532.329.080,00	1.060,00	693,36
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000,00	256.922.000,00	100,00	59,33
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	430.785.000,00	414.606.550,00	100,00	96,24
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	147.350.000,00	145.740.000,00	100,00	98,91
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120.985.000,00	119.884.050,00	100,00	99,09
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	162.450.000,00	148.982.500,00	100,00	91,71
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TA. 2023**

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	174.180.000,00	154.020.000,00	100,00	88,43
--	---	----------------	----------------	--------	-------

Sumber: Sub Bagian Keuangan 2023 ,diolah

Penyerapan anggaran sebesar 91,5% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan

jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2023 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangannya;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting

lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.